

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan buruknya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi serta buruknya sistem pengendalian intern sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Udiyanti dan Darmawan, 2014).

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini di beberapa instansi pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Opini diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum benar, kurangnya Kompetensi Staf Akuntansi yang ada serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang belum memadai.

Laporan keuangan pemerintahan daerah setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari BPK. Berdasarkan laporan hasil dari Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten

Klaten pada tahun anggaran 2014 mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian”. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Badan Pemeriksaan Keuangan juga menambahkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Pemerintahan Kabupaten Klaten belum terlalu kuat atau masih lemah (ppid.klatenkab.go.id).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini yang pertama adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkan standar pemerintah yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Faktor yang kedua adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan

keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, apabila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel.

Faktor yang ketiga adalah Kompetensi Staf Akuntansi. Dalam Kualitas laporan keuangan selain diperlukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik tentunya dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan kompetensi yang baik dari Staf Akuntansi. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak memiliki Kompetensi Staf Akuntansi yang baik maka, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga kualitas laporannya akan menurun (Udiyanti dan Darmawan, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tentang atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena diterapkannya sistem pengendalian intern maka pemerintah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern seperti ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dikarenakan sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas sehingga informasi-informasi yang dilaporkan akan lebih akurat serta mengurangi tindakan-tindakan yang tidak etis yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Udiyanti, Atmadja dan Darmawan (2014) menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penelitian Dewi, Sinarwati dan Darmawan (2014), menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fikri (2015), yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi aparatur dan Peran Audit Internal

Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB).

Penelitian ini mengganti variabel Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Staf Akuntansi. Staf akuntansi berperan penting dalam menyusun dan menyajikan suatu laporan keuangan. Semakin baik staf akuntansi yang dimiliki sebuah instansi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik juga. Hasil dari pengujian yang dilakukan oleh fikri et al (2015) pada penelaitan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan dan sistem pengendalian internnya tidak dapat memoderasi hubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal inilah yang menarik penulis untuk memasukkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kompetensi Staf Akuntansi untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “INTERAKSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Interaksi Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Interaksi Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah Interaksi Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Untuk menganalisis pengaruh Interaksi Sistem Pengendalian Intern dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Interaksi Sistem Pengendalian Intern dengan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Untuk menganalisis pengaruh Interaksi Sistem Pengendalian Intern dengan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, Penulis berharap mendapatkan gambaran yang lebih jelas antara teori dan praktik yang sebenarnya terjadi dalam instansi dan tentunya sebagai sarana untuk menambahkan wawasan dalam hal proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi aktivitas akademis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan penambah wawasan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Instansi, sebagai informasi tambahan atau masukan pada pemerintah daerah atas apa yang telah dilakukan selama ini khususnya mengenai masalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.